

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran secara umum merupakan sebuah agenda yang diatur secara terstruktur yang nantinya akan dicapai dalam periode waktu tertentu dinyatakan dalam satuan finansial. Anggaran mencakup seluruh kegiatan dalam berorganisasi maupun perusahaan demi terlaksananya agenda tersebut dan untuk mencapai tujuannya. Proses anggaran adalah tahapan yang harus terlaksana dengan baik sehingga didiskusikan dan didedikasikan secara menyeluruh kepada semua yang terkait didalamnya, kemajuan organisasi, dan perkembangan yang terarah.

Menurut Ramandei (2009) mengatakan bahwa suatu Organisasi membutuhkan anggaran untuk memanasikan seluruh strategi ke dalam rencana dan tujuan, baik jangka pendek dan jangka panjang (Sinurat, 2015). Sartono (2014) menjelaskan bahwa anggaran mempunyai fungsi penting bagi sektor publik khususnya pemerintahan karena, 1) instrumen bagi pemerintah untuk menentukan arah pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 2) sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat adalah tak terbatas dan terus berkembang, 3) bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat (Meilia, 2015). Panghegar (2013) menyatakan bahwa anggaran merupakan alat pembandingan kinerja anggaran antara target anggaran yang telah ditetapkan dengan pencapaian hasil organisasi secara aktual.

Sistem penganggaran di sektor pemerintahan mempunyai aturan yang jelas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang disesuaikan setiap tahun untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Anggaran dalam lingkungan pemerintah pusat dikenal dengan istilah RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga). Hal ini tentunya juga berlaku di Kejaksaan yang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bidang hukum yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan.

Proses penganggaran di Kejaksaan dimulai dengan menyusun rencana kinerja pemerintah (RKP) yang berisi rincian permintaan anggaran dari setiap satker dalam suatu wilayah Kejaksaan Tinggi berdasarkan realisasi penanganan perkara untuk anggaran di bidang teknis, sedangkan untuk anggaran operasional perkantoran disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan pegawai di satker yang bersangkutan.

Namun dalam hal ini, penyusunan anggaran yang dimaksud adalah penyusunan anggaran rutin dan penyusunan anggaran pembangunan pada bagian perencanaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Bagaimana proses penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang menjadi tujuan dan latar belakang dalam penulisan tugas akhir ini.

Maka Berkaitan dengan hal tersebut yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk membahas sebuah judul, “PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN RUTIN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT”

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana anggaran rutin dan anggaran pembangunan disusun pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

1.3. Tujuan Magang

1. Untuk memahami proses penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

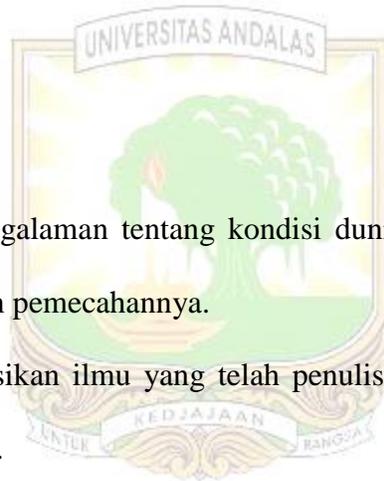
1.4. Manfaat Magang

1.4.1. Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan pengalaman tentang kondisi dunia kerja serta permasalahan yang sering ditemui dan pemecahannya.
2. Mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang proses penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
4. Membentuk Kepribadian bertanggung jawab dan tangguh dalam dunia kerja.

1.4.2. Bagi Universitas Andalas

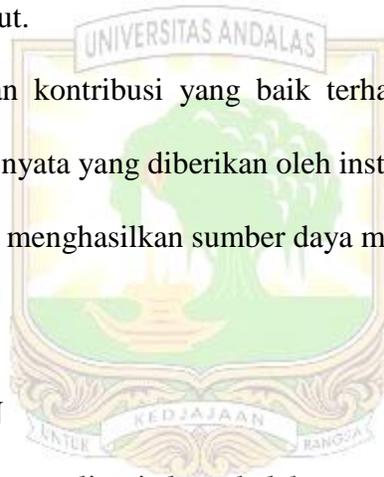
1. Untuk menjalin kerja sama serta hubungan yang baik antara Universitas Andalas dengan Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang.



2. Untuk meningkatkan kualitas lulusan universitas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal oleh masyarakat luas dan oleh dunia kerja.
3. Mempromosikan Diploma III Keuangan yang berkualitas serta siap bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.

1.4.3. Bagi Instansi

1. Dapat membina kerja sama antara instansi terkait dengan lembaga pendidikan.
2. Memberi kontribusi langsung terhadap pekerjaan karyawan di Institusi atau Perusahaan tersebut.
3. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
4. Menunjang dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.



1.5 Sistematika Laporan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, tempat, rencana kegiatan dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa teori dasar yang digunakan meliputi Pengertian Anggaran, Parisipasi Penganggaran, serta tujuan anggaran.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Uraian dimulai dari awal berdirinya, visi misi, struktur instansi, tujuan dan lokasi, serta manfaat instansi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang “Proses Penyusunan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat”.

BAB V : PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran

